

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan pada 16 SMA Negeri terakreditasi A di Kabupaten Pesisir Selatan, implementasi aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) memperlihatkan praktik tata kelola yang berjalan melalui rangkaian perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga penanganan kendala secara berurutan dan terstruktur. Kesimpulan penelitian dirumuskan langsung dari temuan empiris sebagai berikut.

1. Pada tahap perencanaan, seluruh sekolah sampel telah menyusun RKAS melalui aplikasi ARKAS dengan melibatkan kepala sekolah dan bendahara sebagai pelaksana utama. 13 sekolah melakukan penyusunan sejak awal tahun anggaran secara sistematis, sedangkan 3 sekolah masih melakukan penyesuaian bertahap pada kelengkapan administrasi dan sinkronisasi kebutuhan riil. Meskipun terdapat variasi teknis, seluruh proses perencanaan tetap terdokumentasi di dalam sistem dan mengacu pada struktur akun belanja resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan Dana BOSP telah dilaksanakan sesuai koridor regulasi, khususnya Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, karena setiap rencana kegiatan disusun, direvisi, dan disahkan melalui mekanisme aplikasi yang ditetapkan pemerintah.

2. Pada tahap pelaksanaan, realisasi penggunaan dana di seluruh sampel sekolah dicatat melalui ARKAS dan disesuaikan dengan RKAS yang telah disahkan. 14 sekolah membiasakan pencatatan rutin harian atau mingguan, sedangkan 2 sekolah mengalami penundaan input akibat keterbatasan waktu pengelola dan tingginya beban administrasi. Meskipun demikian, seluruh transaksi tetap dilengkapi bukti fisik serta diverifikasi secara internal oleh kepala sekolah. Temuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan Dana BOSP telah berlangsung tertib secara administratif dan mencerminkan praktik pengendalian anggaran yang berjalan fungsional di tingkat satuan pendidikan.
3. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, seluruh sekolah menyusun laporan melalui Buku Kas Umum digital pada ARKAS, mengunggah bukti transaksi, serta melakukan sinkronisasi data ke sistem Markas dan aplikasi BOSP Kemendikdasmen. Mekanisme ini membentuk alur pertanggungjawaban berjenjang yang memungkinkan verifikasi dari tingkat sekolah, daerah, hingga pusat. Secara administratif, seluruh laporan dapat diselesaikan sesuai ketentuan. Berdasarkan sampel SMA Negeri terakreditasi A tersebut, seluruh sekolah tercatat menerima kembali Dana BOSP pada tahun berikutnya pada Gelombang 1 Tahap 1. Fakta ini bukan sekadar informasi pencairan, melainkan menjadi indikator bahwa kewajiban pelaporan periode sebelumnya telah dipenuhi secara tertib. Dalam konteks tersebut, capaian akreditasi A pada satuan pendidikan ini juga

merefleksikan kualitas tata kelola keuangan yang relatif baik, karena aspek manajemen dan akuntabilitas administrasi turut menjadi bagian dari penilaian kelembagaan sekolah.

4. Meskipun tahapan pengelolaan berjalan, implementasi ARKAS di lapangan tetap dihadapkan pada sejumlah kendala operasional. 9 sekolah melaporkan gangguan teknis aplikasi seperti server lambat, *error* sinkronisasi, dan kegagalan unggah laporan, 5 sekolah menghadapi keterbatasan sumber daya manusia karena pengelolaan bertumpu pada satu operator, 6 sekolah merasakan beban administrasi akibat pencatatan ganda antara dokumen manual dan digital, serta 4 sekolah menugaskan guru aktif sebagai bendahara sehingga beban kerja rangkap tidak terhindarkan. Kendala-kendala tersebut memperlambat ritme kerja administrasi, namun tidak menghentikan pelaksanaan pengelolaan Dana BOSP.
5. Untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan, sekolah melakukan berbagai upaya penyesuaian secara adaptif. Sekolah yang mengalami kendala teknis membiasakan input rutin dan mengikuti pelatihan operator, sekolah dengan keterbatasan SDM menerapkan pembagian tugas dan kerja tim, sekolah dengan beban administrasi tinggi menata ulang alur kerja melalui penjadwalan dan verifikasi berkala, sedangkan sekolah yang bendaharanya merangkap guru melakukan penyesuaian jam kerja serta pemberian dukungan administratif tambahan. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi ARKAS

tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh kapasitas organisasi sekolah dalam mengatur sumber daya yang tersedia.

Secara keseluruhan, rangkaian temuan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi ARKAS pada SMA Negeri terakreditasi A di Kabupaten Pesisir Selatan telah berjalan sesuai kerangka regulasi pada setiap tahapan pengelolaan Dana BOSP, dengan dinamika kendala dan respons penanganan yang bersifat kontekstual. Dengan kata lain, tata kelola keuangan sekolah tidak hanya bergantung pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pada kemampuan adaptasi manajerial di tingkat satuan pendidikan.

## **5.2 Rekomendasi**

Temuan empiris menunjukkan bahwa implementasi aplikasi ARKAS pada SMA Negeri terakreditasi A di Kabupaten Pesisir Selatan secara umum telah berjalan tertib, namun masih dihadapkan pada sejumlah kendala operasional yang bersifat teknis, administratif, dan kelembagaan. Oleh karena itu, rekomendasi yang dirumuskan dalam penelitian ini diarahkan sebagai langkah perbaikan praktis yang relevan dengan kondisi nyata di lapangan serta dapat diterapkan secara langsung oleh pemangku kepentingan.

1. Pada aspek teknis aplikasi, gangguan server, keterlambatan sinkronisasi, serta pembaruan sistem yang terjadi pada periode pelaporan terbukti menghambat efisiensi kerja pengelola keuangan di beberapa sekolah. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan dukungan teknis dari dinas pendidikan melalui penyediaan layanan

bantuan teknis (helpdesk), pendampingan operator, serta penjadwalan pembaruan sistem di luar periode kritis pelaporan. Langkah ini diperlukan agar proses input dan pelaporan tidak menumpuk pada akhir semester dan tidak menambah beban kerja bendahara.

2. Pada aspek sumber daya manusia, keterbatasan personel dan ketergantungan pada satu operator menyebabkan proses pengelolaan keuangan rentan terganggu ketika terjadi pergantian atau ketidakhadiran petugas. Berdasarkan temuan tersebut, pengelolaan ARKAS perlu didukung oleh model kerja tim, bukan individual, dengan melibatkan bendahara, operator sekolah, dan unsur manajemen sekolah secara kolaboratif. Selain itu, pelatihan teknis berkala bagi pengelola keuangan perlu dilaksanakan secara terstruktur untuk memastikan kesinambungan kompetensi dalam penggunaan sistem digital.
3. Pada aspek beban administrasi, praktik pencatatan ganda antara dokumen manual dan digital masih menyita waktu kerja pengelola. Penataan alur kerja internal melalui penjadwalan input rutin, pengarsipan berkala, serta pembagian tugas administratif terbukti membantu mengurangi penumpukan pekerjaan pada akhir periode. Oleh karena itu, pola kerja berbasis jadwal dan verifikasi berkala perlu dipertahankan sebagai prosedur tetap dalam pengelolaan Dana BOSP di sekolah.

4. Pada aspek kelembagaan, kondisi guru yang merangkap sebagai bendahara menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keuangan sekolah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kependidikan. Sekolah yang belum memiliki tenaga administrasi khusus perlu melakukan penyesuaian beban tugas, pembagian kerja, serta dukungan administratif tambahan agar tanggung jawab pengelolaan keuangan tidak mengganggu tugas utama pembelajaran. Dalam jangka panjang, pemenuhan tenaga kependidikan administrasi keuangan menjadi kebutuhan struktural yang perlu diprioritaskan dalam perencanaan sumber daya sekolah.

Secara keseluruhan, penguatan implementasi ARKAS tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan sistem aplikasi, melainkan oleh kesiapan organisasi, kompetensi pelaksana, serta penataan manajemen kerja di tingkat satuan pendidikan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola Dana BOSP yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel secara berkelanjutan.

Dan secara keseluruhan, rangkaian temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi aplikasi ARKAS dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan bukan sekadar persoalan kepatuhan administratif, melainkan proses manajerial yang menuntut kesiapan sistem, kompetensi pelaksana, serta penataan organisasi sekolah secara berkelanjutan. Melalui penguatan pada aspek teknis, sumber daya manusia, dan tata kelola internal, pengelolaan Dana BOSP di tingkat satuan

pendidikan dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan empiris sekaligus dasar pertimbangan praktis bagi sekolah dan pemangku kebijakan dalam menyempurnakan tata kelola keuangan pendidikan di masa mendatang.